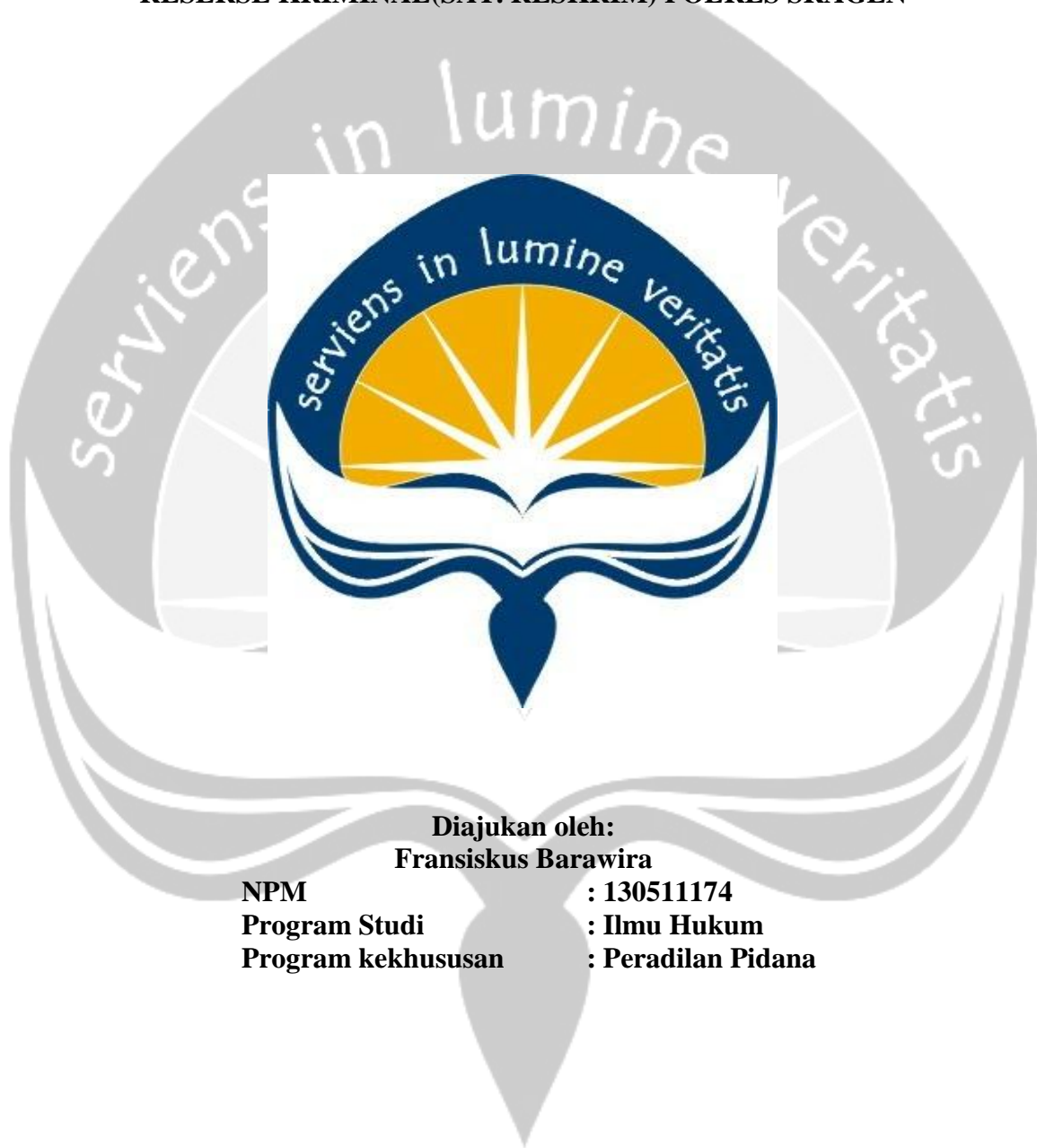


JURNAL

**PROSES PEMERIKSAAN
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
GUNA MEMENUHI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DI TAHAP
PENYIDIKAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATUAN
RESERSE KRIMINAL(SAT. RESKRIM) POLRES SRAGEN**



**Diajukan oleh:
Fransiskus Barawira**

**NPM : 130511174
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PROSES PEMERIKSAAN
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
GUNA MEMENUHI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DI TAHAP
PENYIDIKAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATUAN
RESERSE KRIMINAL(SAT. RESKRIM) POLRES SRAGEN**



Diajukan oleh:

Fransiskus Barawira

NPM : 130511174
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FAKULTAS
HUKUM**

Endro Susilo, S.H., LL.M.

**PROSES PEMERIKSAAN
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
GUNA MEMENUHI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DI TAHAP
PENYIDIKAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATUAN
RESERSE KRIMINAL(SAT. RESKRIM) POLRES SRAGEN**

Fransiskus Barawira

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: fransiskus.barawira21@gmail.com

Abstract

The Law writing/Thesis is entitled **EXAMINATION PROCES OF CHILD FACEING THE LAW TO FULFILLS THE BEST INTEREST OF THE CHILD AT THE INVESTIGATION STAGE UNIT PPA. SAT. RESKRIM POLRES SRAGEN** with the formulation of the problem: 1. How the examination proces of child dealing with the law, purpose fulfills the best interest of the child at the investigation stage unit PPA. Sat. Reskrim Polres Sragen, and 2. What is the obstacle of the investigator, purpose fulfills the best interest of the child. Based on the results of the analysis, it is found that the process of examination of the Child facing the law in the stages of investigation Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen has been conducted by investigators who have the competence as a child investigator who specializes in the field of investigation of the Child against the law, so that the best interests for the child has been fulfilled. In overcoming obstacle, then the solution invites structural officials from the district level in this case the Empowerment of Women and Children up to urban or village level to participate in the handling of children.

Keyword :Examination, Child and Investigation.

1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memuat keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada prinsipnya ABH adalah sebagai korban dari sistem kehidupan manusia itu sendiri.

Apabila proses penanganan ABH tidak dilaksanakan dengan baik dan benar serta tidak berorientasi pada upaya pemenuhan hak anak menuju pada kepentingan terbaik baginya, maka masa depan peradaban kehidupan manusia akan datang sia-sia, karena anak sebagai penerus cita-cita dan peradaban masa depan telah mengalami cedera kepentingan terbaiknya.

UU SPPA mengingatkan kita seluruh bangsa Indonesia untuk lebih memahami tentang hak-hak anak terutama dalam hal ABH, mulai sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan pengadilan serta proses kembalinya ke tengah

kehidupan masyarakat. Seluruh komponen bangsa mulai dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Sesuai dengan prinsip UU SPPA yang mengamanatkan untuk bergerak seirama terpadu membentuk sebuah sistem yang dilandasi oleh visi dan misi yang sama, dengan tidak mengesampingkan konvensi-konvensi internasional terutama *Universal Declaration of Human Right*.¹ Indonesia sebagai bagian negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap ABH. Indonesia harus turut serta dan aktif untuk mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, yang diwujudkan dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*.²

¹Luhut M.P., Pangaribuan 2000, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP sertia dilengkapi dengan Hukumm Internasional yang Relevan*, Penerbit DJAMBATAN, Jakarta, hlm. 965.

²<http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/270>, tanggal diakses 17 agustus 2017 jam 14.40 WIB.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana proses pemeriksaan ABH guna memenuhi kepentingan terbaik bagi anak ditahap penyidikan Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen?
2. Apa yang menjadi hambatan Penyidik Unit PPA Sat. Rekrim Polres Sragen, guna memenuhi kepentingan terbaik bagi anak?
3. Tinjauan Pustaka
 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - a. Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi dari berbagai negara terdapat ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi disebut dengan *politiea*, di Inggris *Police* juga dikenal istilah *Constable*, di Jerman *Polizei*, di Amerika Serikat *Sheriff*, di Belanda *Politie*, di Jepang dengan istilah *Koban* dan *Chuzaisho*, sesungguhnya istilah *Koban* adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *Chuzaisho* adalah polisi di wilayah pedesaan, namun dalam perkembangannya Korps Polisi di Jepang di sebut *Koban* atau *Chuzaisho*.³
 - b. Struktur Kepolisian

Organisasi Lembaga Polri mempunyai struktur baik secara formal maupun informal. Struktur formal

³Sadjijono, 2006, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, Mediatama*, Surabaya, hlm. 1

meliputi bagan dan garis otoritas/garis komando serta pengendalian mulai dari tingkat Mabes sampai ketingkat kewilayahan yang disesuaikan dengan pembagian wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab setiap level dalam mencapai tujuan organisasi, dengan batas wilayah hukum untuk tingkat Mabes bertanggung jawab pada wilayah hukum seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, tingkat Polda memiliki wilayah hukum dalam satu wilayah Provinsi, tingkat Polres/Polresta memiliki wilayah hukum dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Polsek memiliki wilayah hukum di wilayah Kecamatan.

c. Tugas Pokok Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) Pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Polri memiliki tanggungjawab menciptakan dan membina suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat, keadaan aman dan ketertiban adalah keadaan bebas dari

kerusuhan atau kehancuran yang dapat mengancam keseluruhan masyarakat atau perorangan serta memberikan jaminan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran.

d. Wewenang Kepolisian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

2. Anak

a. Pengertian Anak

Pembahasan pengertian anak sebelumnya dapat diawali dengan pentingnya anak sebagai bagian warga negara yang harus dilindungi, karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa mendatang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.⁴ Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, kamus hukum, hasil penelitian, surat kabar, jurnal, internet dan fakta hukum.

c. Cara Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, surat kabar, jurnal, internet dan fakta hukum.

2) Narasumber

Wawancara dengan narasumber dilakukan kepada Para Penyidik Di Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen.

d. Analisis Data

Bahan hukum dan data yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan aturan perundang-undangan kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif yang berarti analisis bahan hukum dibuat berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan secara tertulis. Bahan hukum yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut ditarik suatu kesimpulan penelitian dengan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

⁴Sinaga Dahlan, 2017, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Yogyakarta, hlm. 45

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pemenuhan Kepentingan Terbaik Bagi Anak pada Tahap Penyidikan di Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen

a. Hasil Penelitian

1) Struktur Organisasi Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen

Menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, kepolisian resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kapoldadipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor disingkat Kapolres. Polres Sragen memiliki wilayah hukum sesuai dengan wilayah teritorial Kabupaten Sragen, yang dibentuk dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Proses Penyidikan

Proses Penyidikan perkara pidana secara umum dilakukan oleh Penyidik Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen dengan mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya terhitung mulai tanggal 31 Juli 2014 segala tindakan penyidikan terhadap adanya dugaan anak sebagai pelaku tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana mempedomani juga UU SPPA.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Prinsip yang ada di balik hakikat Penyidikan menurut KUHAP itu sama sekali tidak memungkinkan diversi di dalamnya. Hal ini menjadi lain, dengan diberlakukannya diversi menurut pasal 6 sampai dengan pasal 15 UU SPPA.⁵

a. Pemanggilan

Dalam melakukan pemanggilan terhadap ABH penyidik Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen berusaha untuk dapat langsung bertemu kepada ABH melalui orang tua atau wali. Surat panggilan yang telah dibuat secara sah disampaikan kepada ABH melalui orang tua atau wali dengan tempo waktu yang cukup, namun untuk upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, maka penyidik akan berkoordinasi dengan orang tua atau wali agar pada kesempatan pertama dapat memenuhi panggilan tersebut tanpa harus menunggu waktu yang ditentukan dalam surat panggilan.

b. Penangkapan

Dalam hal pada tahap penyidikan diperlukan adanya tindakan penangkapan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penyidik Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen akan melakukan tindakan tersebut secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan anak sesuai

⁵ Sinaga Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 133.

dengan umurnya, serta akan mengupayakan adanya pendampingan dari orang tua atau wali atau pihak lain yang dipandang perlu selama masa penangkapan yaitu 24 (duapuluh empat) jam dan menempatkan anak di ruang pelayanan khusus anak.

c. Penahanan

Dengan berpedoman Pasal 32 dan 33 UU SPPA tindakan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dimana anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, serta diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat dimintakan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

d. Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap anak adalah suatu kegiatan untuk memperoleh/mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan antara anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi dan anak korban tindak pidana dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga dengan keterangan anak tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana. Pelaksanaan kegiatan permintaan keterangan kepada anak selain wajib didampingi oleh orang tua/wali serta beberapa lembaga yang

ditentukan dalam pasal 22, 23 dan 26 UU SPPA, penyidik Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen juga memberlakukan standar pemeriksaan khusus bagi anak yaitu dengan didengar keterangannya dalam situasi yang penuh keakraban dengan menciptakan suasana kekeluargaan atau layaknya sebuah keluarga, tidak diperiksa berhadapan dengan komputer diatas meja, sehingga anak terbebas dari rasa ketakutan namun esensi atau tujuan pemeriksaan dapat terpenuhi secara utuh dan lengkap.

Hambatan Penyidik Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen, diantaranya :

1. Tidak semua ABH memiliki status keluarga yang lengkap dan jelas atau bahkan tidak mengetahui keberadaan orang tua dan keluarganya.
2. Belum banyak yang memahami semangat diundangkannya UU SPPA, berdampak pada pihak korban yang sering mengajukan ganti rugi melebihi batas kemampuan keluarga anak sebagai pelaku.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

A. Untuk menyamakan persepsi maka disarankan :

1. Latihan terpadu mulai dari Penyidik, Jaksa,

- Hakim, advokad, PK Bapas, LPKS, LPAS dll.
2. Membentuk tim terpadu untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan ke sekolah-sekolah.
- B. Mengatasi hambatan Penyidik Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen, maka dapat disarankan sebagai berikut :
1. Perlunya menggandeng pejabat struktural dari seluruh komponen yang memiliki kompetensi dibidang ABH.
 - b. Memberdayakan peran pemerintah daerah dan mendorong percepatan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan ABH.
 - c. Membangun kedekatan hubungan Personal kepada seluruh personil dari lembaga yang memiliki tugas atau peran dalam hal penanganan masalah ABH.

4. REFERENSI

BUKU:

- Busro Achmad dkk, 2014, *Pendidikan Tinggi Hukum & Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Farid H.A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- PangaribuanLuhutM.P., 2000, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP serta dilengkapi dengan Hukum*

International yang Relevan, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Penerbit Mediatama, Surabaya.

SiahaanMonang, 2016, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT.Grasindo Jakarta.

Sinaga Dahlan, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta.

Wiyono R., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 194 Tahun 2015.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor
4 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi
Dalam Sistem Peradilan Anak,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 153 Tahun
2012.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2010 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja
pada Tingkat Kepolisian Resor
dan Kepolisian Sektor,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun
2002.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2012 Tentang
Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 76 Tahun 1981.

KAMUS:

Soehardi S.A., 2007, *Kamus Populer
Kepolisian*, Penerbit Wira
Raharja, Semarang.

WEBSITE:

<http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/27>
0, tanggal diakses 17 Agustus
2017 jam 14.40 WIB

